

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Hubungan Internasional

Disiplin Ilmu Hubungan Internasional secara resmi didirikan pasca Perang Dunia I dengan tujuan untuk menghindari konflik besar di masa depan dan memastikan adanya perubahan damai. Hal ini tentu menjadi sebuah tujuan yang berharga, namun saat ini ruang lingkup dan kompleksitas politik dunia menuntut pemahaman tentang berbagai masalah yang jauh lebih luas (Triwahyuni, 2010:3). Terdapat banyak pakar atau ahli yang mengemukakan mengenai definisi dari Hubungan Internasional. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Karen Mingst dalam buku yang berjudul “Pengantar Hubungan Internasional” yang menyatakan bahwa “Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi antar berbagai aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, termasuk negara bagian, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, entitas sub-nasional seperti pemerintah daerah dan individu” (Wijatmadja & Ambarwati, 2016).

Sementara itu, Andrias Darmayadi dalam buku yang berjudul “Mengenal Studi Hubungan Internasional” mendefinisikan perbedaan antara Politik Internasional dengan Hubungan Internasional. Politik Internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam artian yang lebih sempit, yaitu dengan berpokok pada diplomasi atau hubungan antar negara dan satuan-satuan politik lainnya. Sedangkan Hubungan Internasional lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, dan tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berpikir dari manusia (Darmayadi, 2015).

2.1.2. Separatisme

Dalam beberapa bangsa atau kelompok, selalu ada orang atau golongan tertentu yang ingin dan berupaya untuk memisahkan diri dari bangsa atau kelompoknya dengan berbagai alasan untuk mendapatkan dukungan. Individu atau kelompok ini disebut sebagai Separatis. Mereka berupaya untuk mendapatkan kedaulatan sebagai bangsa atau kelompok yang merdeka. Pemisahan diri dari negara berdaulat (*secession*), pembentukan wilayah sendiri (*fragmentation*), pendirian pemerintahan otonom (*autonomy*), dan penentuan nasib sendiri (*self determination*) adalah konsep-konsep yang menjadi cakupan dari separatisme (McHenry 2009). Menurut Dewi Fortuna

Anwar, separatisme terkait erat dengan pembentukan negara. Sejumlah gerakan separatis memiliki sejarah panjang kebencian terhadap pemerintah pusat dan kelompok suku atau agama yang dominan (Anwar, 2014:213).

Gerakan separatis / separatisme pada umumnya terjadi di negara-negara majemuk yang memiliki keberagaman suku, budaya dan bahasa seperti Indonesia. Dari berbagai ancaman terhadap negara, separatisme menjadi salah satu ancaman utama bagi Indonesia karena menyangkut masalah kedaulatan wilayah. Sekalipun telah merdeka sejak tahun 1945, masih terdapat kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, seperti halnya adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang masih berlangsung hingga hari ini. Contoh-contoh aksi separatisme lain yang pernah terjadi di Indonesia adalah Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh dan Timor Timur yang pada akhirnya berhasil memisahkan diri dengan Indonesia dan membentuk negara Timor Leste pada tahun 2002.

Gerakan separatis menempuh berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, baik cara damai maupun kekerasan yang melibatkan kekuatan bersenjata dan teror. Dipermukaan gerakan separatis sering kali tampak diwarnai dengan secara kental oleh nasionalisme atau fanatisme agama. Akan tetapi, bila ditelaah secara mendalam, hal yang lebih dominan adalah karena kurangnya keterlibatan kelompok minoritas dalam pengambilan keputusan politik atau kekuasaan serta ketimpangan sosial ekonomi yang diderita.

2.1.3. *Soft Power*

Soft Power menurut Nye (2008) diantaranya terdiri dari unsur- unsur sistem nilai, budaya dan kebijakan. Sebuah negara bisa saja memperoleh apa yang diinginkannya di percaturan politik dunia dikarenakan oleh beberapa faktor, misalnya kekaguman terhadap nilai-nilai atau aspirasinya dalam peningkatan prospek kerja sama serta keterbukaan ekonomi. Hal itulah yang membuat negara lain tertarik untuk mengikuti langkahnya. Tentu saja hal ini bertentangan jelas dengan konsep *hard power* yang menggunakan cara-cara yang bersifat koersif, pemaksaan dan penekanan.

Soft power terdiri dari tiga instrumen yaitu budaya, nilai-nilai dalam negeri, dan kebijakan luar negeri. *Soft power* memiliki istilah aktor-aktor yang terlibat dalam prosesnya yakni *referees* dan *receivers*. *Referees* mengacu pada pihak yang menjadi sumber rujukan legitimasi dan kredibilitas *soft power* sedangkan *receiver* mengacu pada target penerima *soft power*. Sebagai salah satu sumber kekuatan, *culture/kebudayaan* dibagi menjadi dua yakni *high culture* (seni/literatur) dan *pop culture* (*mass entertainment/produksi hiburan massal*).

Unsur yang terakhir adalah *foreign policy* suatu negara, yang mana *foreign policy* merupakan salah satu refleksi dari *national interest* suatu. Apakah kebijakan yang diambil mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh negara tersebut. Apabila nilai tersebut baik maka akan dipandang baik oleh

dunia internasional (Admicc, 2019). Dengan adanya ketiga instrumen tersebut, maka akan tercipta *soft power* yang berarti kemampuan menarik minat pihak lain agar pihak lain dapat terpengaruh sehingga mengeluarkan kebijakan yang diinginkan, sehingga negara dapat mencapai tujuan kebijakan luar negerinya (Roziqi, 2020:1). Dalam hal ini, Indonesia memiliki tujuan kebijakan luar negeri untuk menjadi sebuah penyeimbang kekuatan (*balance of power*) dan kekuatan menengah (*middle power*) di kawasan Indo-Pasifik yang penuh dengan prospek dan masalah.

2.1.4. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional—atau dalam ungkapan Perancis yaitu *raison d'État*—adalah tujuan dan ambisi negara, baik ekonomi, militer, atau budaya. Menurut aliran arus utama dalam studi Hubungan Internasional, konsep ini penting sebagai dasar bagi negara dalam melakukan hubungan internasional. Argumentasi Machiaveli mengenai kepentingan nasional banyak dirujuk dalam praktik maupun pengembangan teoritis, sebagai pembenaran bagi perilaku internasional negara yang mengabaikan kepentingan utama pada masa purba sebelumnya, yaitu agama dan moralitas. Negara diturunkan dari tatanan ilahi dan tunduk pada kebutuhan khususnya sendiri, yaitu kepentingan nasional.

Sejak berakhirnya era kolonisasi (1960-an) dan Perang Dingin (1989), era baru telah memunculkan kekuasaan aktor non-negara, yaitu manusia

secara individu maupun kolektif (komunitas atau institusi swasta) sebagai pemberi legitimasi kebijakan negara. Kepentingan nasional negara yang bersifat egois dan agresif (*hard power*) tergantikan dengan kepentingan yang bersifat individualis sekaligus altruistik dan persuasif yang non destruktif (*soft power*). Konsekuensinya adalah keberadaan diplomasi *soft power* yang memunculkan ragam diplomasi yang memberdayakan publik individu ke dalam ragam bentuk persuasi yang menarik secara populer pada tingkat non-negara dan sub-negara. Namun sejak awal tahun 2000-an (peristiwa 9/11), wacana kepentingan nasional realisme mulai kembali ke permukaan secara perlahan meskipun harus jalan seiringan dengan *soft power* (Bainus & Rachman, 2018: 110).

Kepentingan nasional dibagi menjadi dua jenis yaitu kepentingan vital dan kepentingan sekunder (Jemadu, 2008). Kepentingan vital ialah berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan sebuah negara, seperti kedaulatan, teritorial, dan sebagainya. Sedangkan kepentingan sekunder ialah kepentingan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sebuah negara seperti perekonomian dan sebagainya. Tujuan-tujuan tersebut diraih melalui media untuk merangkum dan mengemas kepentingan tersebut agar dapat terealisasi, yakni melalui kebijakan luar negeri (Baylis & Smith, 2001)

2.1.5. Kebijakan Luar Negeri

Holsti (1970:245) melihat kebijakan luar negeri sebagai konsekuensi dari konsepsi peran nasional yang dimiliki para pembuat kebijakan. Para pengambil kebijakan ini memiliki konsepsi yang berasal dari lokasi (letak) negara, sumber daya dan kemampuan sosial-ekonomi, nilai-nilai nasional, ideologi, peran tradisional, opini publik, kepribadian, dan kebutuhan politik. Holsti percaya bahwa selalu ada “ego” ketika pembuat kebijakan membuat keputusan berdasarkan konsepsi yang dimiliki. Akan tetapi, Holsti tidak mengabaikan kemungkinan persepsi itu “bergeser” karena konsepsi tersebut juga dipengaruhi oleh status negara yang dipimpin dan saran atau nilai – nilai yang seharusnya dianut negara tersebut seperti perjanjian internasional, opini masyarakat internasional, pemahaman informal, prinsip – prinsip internasional, dan peraturan umum yang berlaku.

Holsti memiliki empat asumsi: (1) pembuat kebijakan luar negeri memiliki konsepsi peran nasional, (2) konsepsi peran nasional lebih berpengaruh daripada *role prescriptions* yang datang dari lingkungan internasional; (3) sumber konsepsi peran nasional adalah penggabungan dari lokasi, kemampuan, karakteristik sosial ekonomi, struktur sistem dan kepribadian pemimpin; (4) konsekuensi konsepsi peran nasional adalah sikap atau perilaku negara dan berpengaruh terhadap stabilitas dan perubahan dalam sistem internasional (Adigbuo, 2011: 33).

Kebijakan luar negeri diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan tujuannya: tujuan utama, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan utama dimaknai sebagai segala bentuk kebijakan luar negeri yang harus selalu dicapai, seperti kedaulatan negara, otonomi, dan segala hal yang bertujuan untuk mencegah negara lain untuk mencampuri kedaulatan negaranya. Tujuan jangka menengah adalah berbagai kebijakan luar negeri yang memiliki tingkat urgensi yang lebih rendah dari tujuan utama dan biasanya memerlukan kerja sama antar negara untuk dijalankan. Sementara tujuan jangka panjang, di sisi lain adalah tujuan yang kurang mendesak, seperti ideologi dan visi politik (Holsti, 1997)

2.1.6. Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen ekonomi yang umum digunakan oleh negara-negara maju untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, terutama semenjak berakhirnya konflik Perang Dunia II. Bantuan ini dapat berupa uang, barang atau jasa yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan militer dan bantuan pangan. Dalam beberapa dekade terakhir, proyek bantuan luar negeri seperti meningkatkan infrastruktur di negara penerima, menjadi hal yang sangat umum dilakukan oleh berbagai negara di dunia (Lengauer, 2011:2). Bantuan luar negeri juga sangat erat kaitannya dengan kepentingan nasional.

Untuk melihat motif dari implementasi Indo AID di kawasan Pasifik Selatan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, peneliti menggunakan konsep oleh Maria Andersson yang ditulis dalam jurnalnya yang berjudul *Motives Behind Allocation of Aid: A Case Study Regarding Swedish Motives for Allocation Aid* yang diterbitkan pada tahun 2009. Konsep ini merupakan sebuah perkembangan dari pemikiran konsep-konsep yang telah ada sebelumnya mengenai motif bantuan luar negeri, yang kemudian diolah kembali oleh peneliti. Terdapat enam konsep yang dikemukakan oleh Maria Andersson dalam jurnalnya tersebut, namun dalam penelitian ini, peneliti hanya akan mengambil tiga variabel utama untuk melihat keektivitasan bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui program Indo AID di kawasan Pasifik Selatan. Adapun keempat variabel tersebut, diantaranya; motif kemanusiaan (*humanitarian motives*), motif ekonomi (*economic motives*), dan motif identitas (*identity motives*).

1. Motif Kemanusiaan (*Humanitarian Motives*)

Maria Andersson mengemukakan bahwa *Humanitarian Motives* dapat dilihat dari adanya usaha yang dilakukan oleh negara pemberi bantuan untuk mengungkapkan rasa simpatinya terhadap negara penerima bantuan (negara resipien) melalui bantuan luar negeri. *Showing Compassion* yang merupakan faktor dari *Humanitarian Motives* memiliki makna bahwa sebuah negara pemberi bantuan

mengungkapkan rasa simpatinya terhadap negara penerima bantuan dengan cara memberikan rasa kepeduliannya terhadap negara penerima bantuan tersebut (Andersson, 2009).

2. Motif Ekonomi (*Economic Motives*)

Dalam motif ini, Maria Andersson berusaha menjelaskan bahwa dalam motif ekonomi, negara pemberi bantuan akan melakukan hubungan dagang, mempromosikan bisnis yang terdapat investasi di dalamnya dan juga adanya kegiatan ekspor terhadap negara resipien. Dari adanya indikator-indikator tersebut, dapat terlihat jelas bahwa suatu negara memiliki motif ekonomi dari bantuan luar negeri, yakni dapat dilihat dari adanya indikator *trade investment-export* dimana dapat dilihat dari bagaimana tingkat perdagangan, investasi, dan juga nilai ekspor antara negara resipien dan negara donor (Andersson, 2009).

3. Motif Identitas (*Identity Motives*)

Maria Andersson berpendapat bahwa dalam *identity motives*, negara pemberi bantuan ingin memiliki peran yang signifikan di negara resipien yang kemudian dapat mendongkrak kelebihan dan reputasi dari negara pemberi bantuan di kancah internasional. Indikator tersebut dapat dilihat dari *experience and knowledge* dimana hal tersebut dapat dilihat dari peran negara pemberi bantuan dalam menjadi kolega yang memiliki integritas yang mumpuni bagi negara penerima. Dan juga dari indikator *international recognition* dimana hal tersebut dapat dilihat

dari bagaimana upaya negara pemberi bantuan dalam merubah pandangan dan mendapat pengakuan dari dunia internasional dan dari negara resipien terhadap proyeksi nasional yang dijalankannya (Andersson, 2009).

2.2. Kerangka Pemikiran

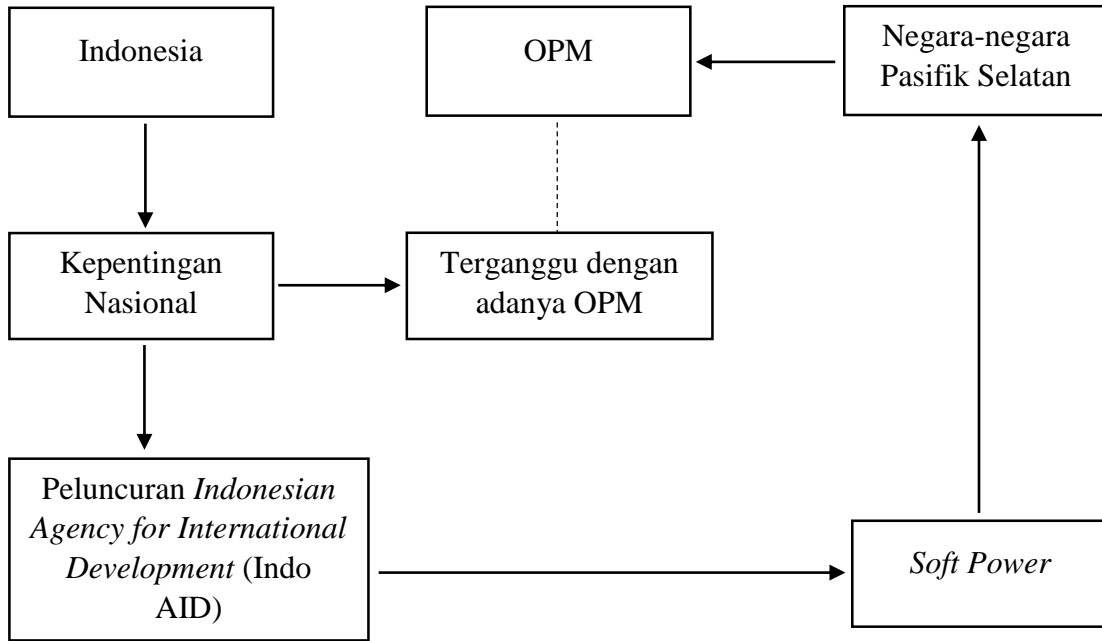
Upaya separatisme Papua yang terjadi di Indonesia telah menjadi sebuah isu transnasional sejak para kelompok-kelompok separatis OPM mencoba menarik dukungan publik internasional melalui kampanye-kampanye negatif yang memperburuk citra Indonesia di mata publik internasional. Upaya ini dilakukan di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, para kelompok separatis dan para pendukungnya pada umumnya melakukan internasionalisasi konflik Papua melalui media digital, seperti media sosial.. Sementara di luar negeri, para kelompok separatis ini melakukan diaspora ke negara-negara di Eropa, Australia dan negara-negara Pasifik Selatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Papua, Indonesia.

Kesamaan ras Melanesia mendorong negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dengan mudah memberikan dukungannya terhadap gerakan separatis ini. Rasa solidaritas yang tinggi ini mendorong munculnya perjuangan ras Melanesia untuk dapat menentukan nasibnya sendiri dan tidak dijajah oleh ras lain atau yang dikenal dengan *Melanesian Way* (Riyanto, 2021:5). Dukungan

negara-negara Pasifik Selatan terhadap kemerdekaan Papua dilatar belakangi oleh pandangan bahwa tanah Papua adalah bagian terbesar eksploitasi etnis ras Melanesia (Noch, Wawancara 10 Desember 2020). Dukungan ini tentu saja telah mengancam kedaulatan dan tujuan nasional NKRI, namun di lain sisi, dukungan internasional dan pengakuan atas negara merupakan salah satu fondasi dasar dalam hubungan diplomatik.

Oleh sebab itu, meresponi fenomena ini, Pemerintah Indonesia berupaya memaksimalkan upaya *soft power*-nya melalui pemberian bantuan luar negeri yang dikelola oleh *Indonesian Agency for International Development* (Indo AID) dalam upaya meningkatkan citra positifnya di kawasan Pasifik Selatan dan mempertegas identitas kedaulatannya atas Papua Barat terhadap negara-negara di Pasifik Selatan, dan bukan OPM (lihat bagan 2.1).

Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran



(Sumber: Hasil olahan peneliti, 2022)

